



Sajian Ringkas seputar Sertifikasi

Monitoring sertifikasi hutan, merupakan salah satu kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk memastikan proses-proses dalam tahapan sertifikasi dilakukan dengan baik sesuai dengan skema yang dikeluarkan oleh lembaga akreditasi.

Monitoring sertifikasi hutan

Monitoring sertifikasi hutan, merupakan salah satu kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk memastikan proses-proses dalam tahapan sertifikasi dilakukan dengan baik sesuai dengan skema yang dikeluarkan oleh lembaga akreditasi.



Sertifikasi hutan sendiri merupakan salah satu inisiatif dari sekian banyak upaya yang ditujukan untuk memperbaiki pengelolaan hutan di Indonesia dengan memberikan jaminan bahwa sebuah unit manajemen pengelola hutan apabila telah memenuhi persyaratan dalam prinsip-prinsip sertifikasi akan dinyatakan tersertifikasi sehingga produk-produk hasil hutan yang dipasarkan dapat dijamin berasal dari sebuah mekanisme pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Apakah monitoring sertifikasi hutan (FCM) itu?

Monitoring Sertifikasi Hutan merupakan sebuah mekanisme yang dilakukan untuk mengontrol jalannya proses sertifikasi pengelolaan hutan, dan memastikan dilaksanakannya prinsip-prinsip pengelolaan hutan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan Lembaga akreditasi oleh sebuah unit manajemen pengelolaan hutan.

Mengapa perlu monitoring sertifikasi hutan?



Pemberian sertifikasi hutan oleh lembaga sertifikasi dilakukan melalui sebuah proses yang panjang, dimana sebuah unit manajemen harus memenuhi persyaratan sesuai dengan kriteria dan indikator yang dikeluarkan oleh lembaga akreditasi. Monitoring sertifikasi hutan merupakan salah

satu upaya agar sebuah proses sertifikasi yang sedang berlangsung dapat terjaga kredibilitasnya. Di sisi lain, FCM juga merupakan proses awal sebagai media pembelajaran dari *stake-holder* untuk saling memahami hak dan kewajiban serta peran masing-masing pihak sehingga terciptalah ruang dialog dari para pihak tersebut untuk mendorong terciptanya pengelolaan hutan berkelanjutan.

Siapa yang terlibat dalam proses FCM ini

Yang terlibat dalam proses monitoring sertifikasi ini adalah para pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan hutan, seperti pemerintah sebagai pengambil kebijakan, pengusaha sebagai pengelola hutan, LSM dan lembaga akreditasi serta masyarakat setempat dimana sebuah proses sertifikasi dilaksanakan. Keterlibatan para pihak tersebut difasilitasi oleh sebuah forum konsultasi sebagai sebuah media komunikasi. Melalui forum tersebut tercipta dialog yang bersifat memberikan masukan-masukan terhadap sebuah proses sertifikasi yang sedang berjalan.



Faktor penting dalam FCM

Yang menjadi point penting dalam FCM ini adalah prinsip bahwa masing-masing pihak memiliki posisi yang sama untuk berpartisipasi. Selain itu juga masing-masing pihak memiliki data dan informasi yang akurat dan kredibel untuk kemudian diberikan kepada pihak independen untuk dilakukan verifikasi. Dan yang terpenting sikap saling terbuka untuk membangun ruang dialog antar paripihak.

Bagaimana melakukan FCM yang produktif?

Agar efektif, maka diperlukan sebuah pusat informasi sebagai salah satu wadah untuk menjembatani ruang partisipasi antar para pihak. Pusat Informasi ini



berfungsi sebagai penyedia data dan informasi yang berkaitan dengan proses sertifikasi. Pusat informasi melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber untuk

kemudian mengelolanya dan menginformasikannya kepada seluruh *stake-holder* sehingga data dan informasi yang ada tersusun dengan baik dan dapat dipergunakan setiap saat. Memanfaatkan forum yang sudah tersedia sebagai media tukar menukar informasi dan juga sebagai media dialog antar pihak.

Jangka waktu FCM

Proses monitoring sertifikasi hutan ini dilaksanakan sebelum, pada saat serta sepanjang berlakunya sertifikat ekolabel yang diberikan.

Sebelum proses sertifikasi dimulai, pusat informasi memerlukan data dan informasi yang bersifat makro terkait dengan unit manajemen yang mengajukan diri untuk proses sertifikasi.

Ketika proses sertifikasi berlangsung dan sepanjang diberlakukannya sertifikasi ekolabel, diperlukan data detail dari seluruh pihak terkait mengenai pengelolaan hutan yang dilakukan oleh suatu unit manajemen.

Aspek yang di monitoring

Ada tiga aspek yang dimonitor, yaitu aspek sosial, aspek ekologi dan aspek produksi.

Aspek sosial melihat sejauh mana informasi mengenai kondisi masyarakat (sosial, ekonomi dan budaya) di sekitar unit manajemen, informasi tentang hak dan kewajiban masyarakat atas tanah, termasuk pengelolaan hutan oleh masyarakat, informasi tentang ketidaksepahaman antara unit manajemen dengan masyarakat, informasi (data hasil penelitian) tentang respon masyarakat setempat terhadap pengelolaan hutan unit manajemen.

Aspek Ekologi lebih dekat melihat informasi tentang ekosistem (misal: DAS, sebaran satwa dan flora fauna) di sekitar unit manajemen, informasi tentang daya dukung lingkungan wilayah sekitar unit manajemen, informasi (data hasil penelitian) tentang kondisi ekosistem sebelum dan sesudah ada unit manajemen, informasi tentang pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh unit manajemen.

Sedangkan aspek produksi melihat informasi tentang pengelolaan hutan yang dilakukan oleh unit manajemen, informasi tentang areal kerja (kawasan) dari unit manajemen, informasi tentang rencana kerja setiap tahun dari unit manajemen, informasi tentang tata batas areal unit manajemen dengan lahan masyarakat.

Sejauh ini di mana saja monitoring sudah dilakukan?

Sampai saat ini, FWI baru melakukan monitoring sertifikasi hutan terhadap unit manajemen (UM) PT Diamond Raya Timber dan PT Riau Andalan Pulp and Paper. Kedua UM tersebut melaksanakan sertifikasi hutan berdasarkan skema yang dibangun oleh LEI. Untuk ke depan, FWI akan melakukan monitoring sertifikasi hutan terhadap UM berdasarkan skema LEI maupun FSC bahkan inisiatif-inisiatif sertifikasi hutan yang lain.

Temuan-temuan apa yang ditemukan dari hasil monitoring?

Temuan-temuan yang biasa ditemukan di lapangan ketika dilakukan proses monitoring terhadap sebuah unit manajemen adalah adanya ketidakjelasan tata batas antara unit manajemen dengan areal lain. Hal ini seringkali menimbulkan konflik. Selain itu juga terjadi tumpang tindih ijin pemanfaatan hutan.

Faktor lain yang sering ditemukan adalah kurangnya pengamanan atas konsesi yang dikelola oleh sebuah

unit manajemen sehingga seringkali terjadi perambahan dan *illegal logging*. Di tingkat masyarakat sekitar, munculnya para oportunist sering juga menimbulkan konflik di antara masyarakat setempat.

Apa kesimpulan dan rekomendasi dari proses ini?

Banyak hal yang dapat menjadi bahan PEMBELAJARAN dari kegiatan FCM ini, yaitu:

Terbukanya ruang dialog di antara para pihak yang

terkait dengan sertifikasi hutan, membantu mendorong perbaikan dan pengembangan sistem sertifikasi hutan, mendorong peningkatan kinerja UM, mendorong penataan ulang batas antar kawasan, mendorong perbaikan proses pengorganisasian di tingkat masyarakat serta membuka akses data publik terhadap pemanfaatan sumberdaya hutan. (WT/2005)

